

**PERANAN SUB DOLOG WILAYAH VII MAKASSAR  
DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN PETANI**

**(Studi Kasus pada Petani Padi di Desa Tanralili,  
Kecamatan Maru'su, Kabupaten Maros)**



**JURUSAN SOSIAL EKONOMI PERTANIAN  
FAKULTAS PERTANIAN  
UNIVERSITAS "45"  
MAKASSAR**

**2003**

## LEMBAR PENGESAHAN


Judul Skripsi : PERANAN SUB DOLOG WILAYAH VII MAKASSAR  
DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN PETANI.  
(Studi Kasus pada Petani Padi di Desa Tanralili, Kecamatan  
Maru'su, Kabupaten Maros )


Nama Mahasiswa : MAWARDI

Stambuk : 45 97 033 005

Fakultas/Jurusan : Pertanian / Sosial Ekonomi Pertanian

Skripsi ini Telah Diperiksa  
Dan Disetujui Oleh,

  
**Ir. FAIDAH AZUS, M.Si**  
Pembimbing I

  
**Ir. RATNAWATI TAHIR, M.Si**  
Pembimbing II

  
**Ir. BAHARUDDIN, MS**  
Pembimbing III

Disetujui Oleh

Dekan Fakultas Pertanian  
Universitas "45" Makassar

  
**Dr. Ir. MIR ALAM BEDDU, MSi**

Ketua Jurusan Sosial Ekonomi Pertanian  
Universitas "45" Makassar

  
**Ir. M. JAMIL GUNAWI, MSi**

Tanggal Lulus : 14 Juni 2003

## LEMBARAN PENGESAHAN

Judul Skripsi : Peranan Sub Dolog Wilayah VII Makassar dalam Peningkatkan Pendapatan Petani (Studi Kasus pada Petani Padi di Desa Tanralili, Kecamatan Maru'su, Kabupaten Maros)

Nama Mahasiswa : **M A W A R D I**


No. Stb/Nirm : 4597033005/9971110710334

Jurusan : Sosial Ekonomi Pertanian

Fakultas : Pertanian Universitas "45"



**Ir. FAIDAH AZUZ, MSi**  
Pembimbing I

 11/06-03.

**Ir. RATNAWATI TAHIR, MSi**  
Pembimbing II

 11/06-03

**Ir. BAHARUDDIN, MS**  
Pembimbing III

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah Rabbil Alamin, penulis ucapkan rasa syukur kehadiran Allah SWT. Yang telah memberikan Rahmat dan Karunia-Nya, sehingga dapat menyusun skripsi ini. Skripsi ini merupakan salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Pertanian pada Fakultas Pertanian Universitas "45" Makassar.

Penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Faidah Azuz, Ratnawati Tahir, dan Baharuddin, selaku dosen pembimbing I, II dan III, yang telah memberikan bimbingan, pengarahan dan saran-saran serta dorongan dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga jerih payah beliau mendapat Rahmat di sisi Allah SWT.

Selanjutnya sembah sujud ananda kepada yang tercinta Ibunda dan Ayahanda yang senantiasa memberikan kasih sayang, motivasi dan do'a tulus kepada ananda. Semoga kebaikan beliau mendapatkan magfirah disisi Allah SWT juga untuk saudara-saudaraku tercinta atas motivasi dan bantuan yang diberikan.

Pada kesempatan ini juga disampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada:

1. Rektor Universitas "45" Makassar.
2. Dekan Fakultas Pertanian yang senantiasa memberikan bantuan dan perhatian akan pengadaan sarana dan prasarana belajar bagi mahasiswa dalam lingkup Fakultas Pertanian.



3. Ketua Jurusan Sosial Ekonomi Pertanian serta segenap staf dosen, karyawan/karyawati, pada Fakultas Pertanian yang telah banyak memberikan bantuan dan dukungan moril selama penulis menempuh studi hingga penyelesaian skripsi ini.
4. Kepala Sub Dolog Wilayah VII Makassar beserta stafnya yang telah banyak memberikan bantuan kepada penulis.

Kepada semua pihak yang turut memberikan bantuan dalam menyelesaikan skripsi ini baik bantuan moril maupun material, penulis tak lupa menyampaikan terima kasih.

Penulis menyadari sepenuhnya sebagai manusia yang tidak luput dari berbagai keterbatasan dan kelemahan. Oleh karena itu, saran dan kritikan yang bersifat konstruktif sangat penulis harapkan. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi para pembaca.

Makassar, Februari 2003

**Penulis**

## RINGKASAN

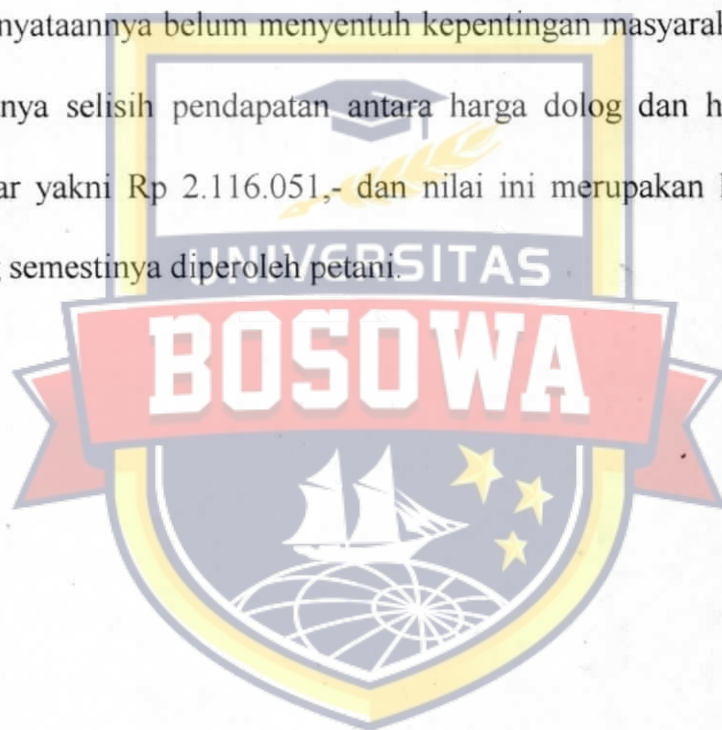
**Mawardi** (4597033005). Peranan Sub Dolog Wilayah VII Makassar dalam Peningkatkan Pendapatan Petani (Studi Kasus pada Petani Padi di Desa Tanralili, Kecamatan Maru'su, Kabupaten Maros). Dibimbing oleh **Faidah Azuz, Ratnawati Tahir** dan **Baharuddin**.

Penelitian dilaksanakan di Desa Tanralili Kecamatan Maru'su, Kabupaten Maros yang merupakan salah satu wilayah kerja Sub Dolog Wilayah VII Makassar, berlangsung mulai bulan November 2002 sampai Pebruari 2003. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah usahatani padi di Desa Tanralili Kecamatan Maru'su sebagai wilayah kerja Sub Dolog Wilayah VII Makassar memberikan keuntungan bagi petani, dan juga mengetahui peranan Sub Dolog Wilayah VII Makassar dalam meningkatkan pendapatan petani padi melalui pengendalian harga dasar gabah.

Metode analisis yang digunakan adalah analisis pendapatan yaitu mengukur tingkat pendapatan/keuntungan yang diperoleh petani baik berdasarkan harga pasar maupun harga yang ditetapkan dolog, dan juga analisis R/C ratio untuk mengetahui kelayakan usahatani padi berdasarkan harga dasar gabah yang berlaku ditingkat petani.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat pendapatan (keuntungan) yang diperoleh petani padi selama satu kali musim tanam di Desa Tanralili Kecamatan Maru'su adalah Rp 2.590.328,- dengan R/C-ratio sebesar 2,74 berarti usahatani padi di Desa Tanralili Kecamatan Maru'su memberikan

keuntungan dan layak diusahakan. Selanjutnya peranan Sub Dolog dalam menetapkan harga dasar gabah ditingkat petani belum efektif karena harga yang ditetapkan Sub Dolog sebesar Rp 1.519,-namun yang berlaku ditingkat petani hanya sebesar Rp 1.000,-. Meskipun usahatani padi memberikan keuntungan, tetapi petani tidak bisa menikmatinya, atau kebijakan sub dolog tersebut pada kenyataannya belum menyentuh kepentingan masyarakat. Hal ini ditunjukkan adanya selisih pendapatan antara harga dolog dan harga pasar yang cukup besar yakni Rp 2.116.051,- dan nilai ini merupakan kehilangan pendapatan yang semestinya diperoleh petani.



## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
HALAMAN JUDUL .....	i
LEMBAR PENGESAHAN .....	ii
I PENDAHULUAN .....	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Perumusan Masalah .....	3
1.3 Tujuan dan Kegunaan .....	4
II TINJAUAN PUSTAKA .....	5
2.1 Peranan Buolog .....	5
2.2 Kebijakan Harga Dasar Gabah .....	6
2.3 Sistem dan Persyaratan Pembelian Gabah .....	8
2.4 Pengertian Produksi dan Fungsi Produksi .....	10
2.5 Pengertian Pendapatan .....	13
2.6 Hipotesis .....	15
III METODOLOGI PENELITIAN .....	16
3.1 Tempat dan Waktu .....	16
3.2 Penentuan Sampel .....	16
3.3 Pengumpulan Data .....	16
3.4 Metode Analisis .....	17
3.5 Definisi Operasional .....	18
IV. GAMBARAN UMUM SUB DOLOG WIL. VII MAKASSAR.....	19
4.1 Sejarah Singkat Sub Dolog Wil. Makassar .....	19
4.2 Struktur Organisasi .....	23



	<b>Halaman</b>
4.3 Tugas Wewenang dan Tanggung Jawab .....	25
4.4 Fungsi Sub Dolog VII Makassar .....	29
<b>V. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>33</b>
5.1 Identitas Responden .....	33
5.1.1 Umur .....	33
5.1.2 Tingkat Pendidikan .....	34
5.1.3 Jumlah Tanggungan Keluarga .....	36
5.1.4 Pengalaman Berusahatani .....	37
5.1.5 Luas Lahan Garapan .....	38
5.2 Produksi .....	39
5.3 Analisis Biaya Usahatani Padi .....	40
5.4 Analisis Pendapatan Usahatani Padi .....	42
5.5 Peranan dan Strategi Sub Dolog Wilayah VII Makassar .....	44
<b>VI. KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>50</b>
6.1 Kesimpulan .....	50
6.2 Saran .....	52
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>53</b>



## DAFTAR TABEL

Nomor		Halaman
1.	Tingkat Umur Responden Dalam Usahatani Padi di Kabupaten Maros Tahun 2003 .....	33
2.	Tingkat Pendidikan Responden Dalam Usahatani Padi di Desa Tanralili Kecamatan Maru'su, 2003 .....	35
3.	Jumlah Keluarga Responden Dalam Usahatani Padi di Kab. Maros, 2003 .....	36
4.	Pengalaman Pesponden Dalam Usahatani Padi di Kabupaten Maros, 2003 .....	38
5.	Luas Lahan yang Dimiliki Responden Dalam Usahatani Padi di Desa Tanralili Kecamatan Maru'su, 2003 .....	39
6.	Jumlah Produksi yang Diperoleh Responden di Kabupaten Maros, 2003 .....	40
7.	Analisis Rata-rata Biaya Usahatani Padi Per Periode Panen di Desa Tanralili Kecamatan Maru'su, 2003 .....	41
8.	Analisis Rata-rata Pendapatan Responden Dalam Usahatani Padi Per Periode Produksi di Desa Tanralili Kecamatan Maru'su, 2003 .....	43
9.	Pembelian Gabah Sub Dolog Wilayah VII Makassar Berdasarkan Wilayah Kerja Selama Tahun 2002 .....	45
10.	Pengadaan Gabah Sub Dolog Wilayah VII Makassar Selama Tahun 1995-2002 .....	46

## I. PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Ketersediaan pangan (*food availability*) bagi kehidupan masyarakat suatu bangsa merupakan bagian penting karena manusia tidak akan dapat hidup tanpa keberadaan pangan. Manusia dapat survive jika ditunjang oleh ketersediaan bahan pangan yang memenuhi kandungan gizi yang cukup tinggi, sehingga dapat memberikan kehidupan yang baik termasuk untuk berperan dalam proses pembangunan.

Pada tahun 1984 Indonesia telah berhasil mencapai swasembada beras, dan pada saat itu Indonesia yang dikenal sebagai negara pengimpor beras terbesar di dunia menghentikan impornya, namun tahun-tahun berikutnya Indonesia mengimpor lagi. Dalam tiga tahun terakhir Indonesia mengimpor beras rata-rata 49236,7 ton pada tahun 1998, 50866,4 ton pada tahun 1999, dan 51179,4 ton pada tahun 2000 (Anonim, 2001).

Atas dasar itu, upaya peningkatan produksi beras terus dilakukan untuk memenuhi kebutuhan beras yang semakin besar seiring dengan penambahan penduduk. Mengingat penambahan penduduk merupakan suatu hal yang tidak bisa ditolak maka kebutuhan akan beras harus terus diimbangi.

Produksi padi Indonesia dalam bentuk gabah kering giling (GKG) pernah mencapai 51,1 juta ton atau setara dengan 33,2 juta ton beras pada tahun 1998.

Sedangkan konsumsi beras per kapita per tahun, Indonesia mencapai sekitar 147,8 kg dengan kebutuhan normal konsumsi beras bagi orang yang makanan pokoknya nasi adalah cukup sekitar 120 kg per kapita per tahun yang selama ini digunakan sebagai takaran bagi pemberian tunjangan beras bagi pegawai negeri.

Mengingat arti dan peranan pangan yang sangat penting dalam menunjang kehidupan manusia maupun eksistensi suatu bangsa, maka pemerintah Indonesia selalu berusaha untuk mencukupi kebutuhan pangan bagi penduduknya, tidak saja ditinjau dari segi kuantitas tetapi juga kualitas. Upaya pemerintah dalam meningkatkan pendapatan petani dan pengembangan ekonomi pedesaan, maka ditetapkan kebijakan perberasan nasional dengan dikeluarkannya Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2001 yang bertujuan antara lain memberikan dukungan bagi peningkatan produktivitas petani padi dan produksi beras nasional, serta melaksanakan kebijakan harga dasar pembelian gabah dan beras oleh Pemerintah yang menekankan harga dasar pembelian gabah kering giling petani dalam negeri oleh Bulog adalah Rp 1.519 per kilogram di gudang Bulog, sedangkan harga dasar pembelian beras petani dalam negeri oleh Bulog adalah Rp 2.470 per kilogram di gudang Bulog.

Daerah Sulawesi Selatan yang dikenal sebagai lumbung beras di Indonesia, dapat diharapkan menambah kebutuhan bahan makanan bagi beberapa daerah di Indonesia terutama di Indonesia Bagian Timur. Dilog Sulawesi Selatan menekankan pengadaan sebesar 400 ribu ton gabah kering



giling (GKG) dan terserap telah mencapai 96.182 ton dengan rata-rata penyerapan di Sulawesi Selatan mencapai 1.000 – 2.000 ton per hari. Sedangkan Sub Dolog Wilayah VII Makassar yang meliputi daerah Pangkep, Maros, Makassar, Gowa dan Takalar telah menghimpun pengadaan sebanyak 23.634 ton.

Disisi lain, dampak melimpahnya beras impor di dalam negeri sudah terasa di beberapa daerah di Sulawesi Selatan yang menyebabkan anjloknya harga gabah kering giling hingga Rp 700 per kilogram. Harga yang sangat rendah ini petani mengalami kerugian besar karena tidak dapat menutupi biaya produksi. Dengan demikian, Dolog Sulawesi Selatan khususnya Sub Dolog Wilayah VII Makassar diharapkan dapat memperhatikan nasib petani agar dapat meningkatkan pendapatannya.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penulis termotivasi untuk meneliti Peranan Sub Dolog Wilayah VII Makassar dalam Meningkatkan Pendapatan Petani Padi.

## 1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka yang menjadi masalah pokok adalah sebagai berikut:

- a. Apakah usahatani padi di Desa Tanralili Kecamatan Maru'su sebagai wilayah kerja Sub Dolog Wilayah VII Makassar memberikan keuntungan bagi petani ?

- b. Bagaimana peranan Sub Dolog Wilayah VII Makassar dalam meningkatkan pendapatan petani padi melalui pengendalian harga dasar gabah.

### 1.3 Tujuan dan Kegunaan

Berdasarkan pada rumusan masalah, maka penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan:

- a. Untuk mengetahui apakah usahatani padi di Desa Tanralili Kecamatan Maru'su sebagai wilayah kerja Sub Dolog Wilayah VII Makassar memberikan keuntungan bagi petani.
- b. Untuk mengetahui peranan Sub Dolog Wilayah VII Makassar dalam meningkatkan pendapatan petani padi melalui pengendalian harga dasar gabah.

Selanjutnya, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan sebagai berikut:

1. Menjadi bahan acuan dalam melindungi petani khususnya penerapan harga dasar gabah.
2. Menjadi suatu informasi dasar bagi penelitian berikut yang sejenis, searah dengan penelitian ini dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan.



## II. TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1 Peranan Bulog/Dolog

Bulog merupakan suatu lembaga pemerintah non Departemen yang menangani masalah pangan antara lain sebagai stabilisator harga bahan pangan khususnya gabah/beras baik dari sisi produsen maupun konsumen.

Pada sisi *produsen*, Bulog berusaha memberikan perlindungan kepada petani dari kemerosotan harga pasar pada musim panen melalui operasi pembelian/pengadaan, sehingga diharapkan petani bisa mendapatkan jaminan harga minimal sama dengan harga dasar yang ditetapkan pemerintah melalui Instruksi Presiden (INPRES). Sebagaimana diketahui bahwa produksi beras dalam negeri bersifat musiman, tidak merata sepanjang tahun. Umumnya sekitar 60 % terjadi pada bulan Januari – Mei, sekitar 30 % terjadi pada bulan Juni – Agustus dan sisanya 10 % pada bulan September – Desember. Adanya konsentrasi produksi yang terjadi pada periode tertentu dibanding dengan konsumsi yang relatif konstan merupakan faktor pemicu yang potensial dalam menyebabkan terjadinya kegagalan pasar (*market failure*) yang selanjutnya dapat berdampak merugikan petani maupun kelangsungan produksi serta penyediaan pangan/beras di dalam negeri (Anonim, 2001).

Dari sisi *konsumen*, Bulog menjamin ketersediaan beras yang cukup dengan harga yang terjangkau oleh daya beli masyarakat. Untuk melaksanakan hal tersebut, Bulog melakukan pendistribusian beras hasil pengadaan dari daerah

surplus ke daerah-daerah defisit serta melaksanakan Operasi Pasar pada saat stock beras di pasaran kurang (Anonim, 2001).

Bulog akan melaksanakan pembelian gabah petani sesuai harga dasar gabah (HDG) yang ditetapkan pemerintah dalam Inpres Nomor 9 Tahun 2001 tentang Kebijakan Perberasan sebesar Rp 1.519 per kilogram gabah kering giling di gudang Bulog. Jadi Bulog tidak boleh membeli di bawah harga atau di atas harga yang sudah ditetapkan dalam Inpres tersebut (Anonim, 2002).

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa bulog berperan untuk mencapai stabilitas harga gabah pada tingkat yang cukup merangsang petani untuk berproduksi, namun beras tersebut masih cukup murah untuk dijangkau oleh daya beli rakyat. Operasi bulog yang utama adalah melakukan pembelian gabah/beras petani pada saat panen raya untuk menjamin tercapainya harga dasar gabah, sekaligus melakukan injeksi beras di pasaran apabila terjadi kenaikan harga beras karena kelangkaan beras pada saat musim paceklik.

## 2.2 Kebijakan Harga Dasar Gabah

Kebijakan harga dasar gabah merupakan salah satu komponen kebijakan perekonomian di bidang pertanian yang penting selama ini sebagai bagian dari kebijakan perberasan yang diorientasikan pada operasi *bufferstock*. Kebijaksanaan mengenai harga biasanya merupakan wewenang pemerintah yang diturunkan dalam bentuk peraturan dan keputusan pejabat berwenang, seperti surat keputusan Menteri atau pejabat yang diberi wewenang untuk itu.

Kebijaksanaan harga dalam bentuk peraturan yang diatur oleh pemerintah yang dalam hal ini adalah kebijaksanaan harga dasar (*floor price*) dan harga tertinggi (*ceiling price*). Harga dasar diperlukan untuk menjaga agar harga pasar pada saat panen raya tidak turun, supaya produsen bisa menerima sesuai dengan harga yang ditetapkan tersebut. Karena diketahui harga dasar ditetapkan berdasarkan besarnya input yang ditanamkan untuk masing-masing komoditas yang diusahakan. Begitu juga harga tertinggi atau harga atap, merupakan kisaran berdasarkan besarnya masukan yang diberikan petani dalam proses produksi komoditas tersebut (Afandi, 2001).

Sebaliknya harga atap (harga maksimum) tetap diperlukan khususnya pada musim-musim paceklik saat persediaan produksi terbatas, sehingga dengan demikian kebijaksanaan harga bisa dikatakan sangat efektif apabila harga pasar berada diantara harga dasar dan harga atap. Kebijaksanaan harga dimaksudkan untuk melindungi produsen dari tekanan pasar tidak berfungsi sempurna. Dalam keadaan harga pasar berada diantara harga dasar dan harga atap, maka baik produsen maupun konsumen masing-masing tidak dirugikan (Daniel, 2002).

Kebijakan harga dasar gabah ditujukan untuk memberikan motivasi bagi petani agar bergairah berusahatani padi sebagai tanaman yang dipilihnya. Motivasi tersebut berupa jaminan kepastian tingkat harga yang akan diperoleh apabila para petani berusahatani padi. Oleh karena itu, kebijakan harga dasar gabah harus merupakan tingkat harga yang sesuai dengan harapan petani padi sebagai target group yang idealnya cukup menguntungkan bagi mereka.



### 2.3 Sistem dan Persyaratan Pembelian Gabah

Di dalam pengadaan/pembelian gabah yang sewaktu-waktu diproses menjadi beras, mempunyai pola-pola pelaksanaan sebagai berikut:

#### 1. Pembelian melalui KUD

- a. Pemerintah tidak menetapkan jumlah atau target pembelian, baik secara nasional maupun untuk masing-masing daerah.
- b. Bulog melaksanakan pengadaan dengan harga pembelian yang ditetapkan pemerintah dalam jumlah berapa saja selama harga pasaran masih atau di bawah harga pasar yang ditetapkan pemerintah.
- c. Pengadaan melalui KUD dilakukan di daerah-daerah produksi pangan dengan memperhatikan situasi yang tersebut pada point (b).

#### 2. Pembelian melalui non KUD

Jenis gabah yang dibeli melalui non KUD adalah gabah kering giling (GKG) dari petani.

#### 3. Pembelian melalui satgas

Dalam melaksanakan pengadaan gabah/beras yaitu satgas ke daerah-daerah yang disebut pengadaan operasional yang dilakukan dengan seizin khusus kepala Bulog serta tata cara pelaksanaannya diatur sesuai dengan peraturan yang berlaku pada Sub Dolog Wilayah VII Kotamadya Ujung Pandang.

Dasar pertimbangan pembelian beras dalam negeri adalah guna memenuhi tujuan pembelian/pengadaan atau pengumpulan gabah/beras, maka

haruslah berdasarkan standar kualitas sesuai Surat Keputusan Bersama Direktur Jenderal Bina Usaha Koperasi dengan Direktur Jenderal Pertanian Tanaman Pangan dengan ketentuan persyaratan standar gabah, sebagai berikut:

### 1. Persyaratan Umum

- Bebas hama dan penyakit yang hidup sebagai kotoran
- Bebas bau busuk, asam dan bau-bau asing lain.
- Bersih dari bahan-bahan kimia yang membahayakan kesehatan dan keselamatan manusia, baik secara visual maupun secara organoleptik.

### 2. Persyaratan Khusus

- |                                    |                    |
|------------------------------------|--------------------|
| a. Derajat sosoh minimum           | : 95 %             |
| b. Kadar air maksimum              | : 14 %             |
| c. Beras kepala minimum            | : 78 %             |
| d. Butir patah maksimum            | : 20 %             |
| e. Butir utuh minimum              | : 35 %             |
| f. Butir kering maksimum           | : 2 %              |
| g. Butir merah maksimum            | : 3 %              |
| h. Butir kuning/rusak maksimum     | : 3 %              |
| i. Butir mengapur maksimum         | : 3 %              |
| j. Benda asing maksimum            | : 0,02 %           |
| k. Butir gabah maksimum            | : 1 butir/100 gram |
| l. Campuran varietas lain maksimum | : 5 %.             |



Berdasarkan persyaratan tersebut, maka akan diuraikan sebagai berikut:

- Butir hampa yaitu butir gabah yang tidak berkembang sempurna akibat serangan hama dan penyakit sehingga tidak berisi butir beras.
- Butir rusak adalah beras pecah kulit (setelah gabah dikupas menjadi beras) seperti butir gabah yang isinya berwarna putih/bening.
- Butir kuning adalah butir beras pecah kulit (setelah gabah dikupas menjadi beras) yang berwarna kuning, coklat atau kekuning-kuningan.
- Butir mengapur yaitu butir pecah kulit yang berwarna putih seperti kapur dan berstruktur lunak yang disebabkan oleh faktor fisiologis.
- Butir hijau yaitu butir beras pecah kulit (setelah gabah dikupas) yang berwarna kehijauan akibat di panen terlalu mudah. Hal ini ditandai dengan patahnya butir-butir hijau tersebut.

#### 2.4 Pengertian Produksi dan Fungsi Produksi

Dalam membahas dan menganalisa tentang produksi maka perlu dibatasi definisi dan pengertian dari produksi tersebut. Pengertian produksi oleh Mubyarto (1989) adalah hasil yang diperoleh sebagai akibat dari bekerjanya beberapa faktor produksi sekaligus antara lain; tanah, modal dan tenaga kerja. Sedang Kartasapoetra (1997) memberikan pengertian tentang produksi adalah suatu proses dimana beberapa barang dan jasa-jasa yang disebabkan oleh input dirobah menjadi barang dan jasa lain disebut output.

Dari kedua pengertian produksi di atas, maka pengertian pertama menunjukkan bahwa produksi adalah hasil yang diperoleh dari kombinasi faktor-faktor produksi berupa tanah, modal dan tenaga kerja. Sedangkan pengertian kedua adalah suatu kegiatan atau suatu proses penggunaan dari input-input (faktor-faktor produksi) yang dikombinasikan untuk menghasilkan barang dan jasa (output) yang mempunyai faedah dalam memenuhi kebutuhan manusia.

Menurut Wahyu (1990) bahwa produksi adalah menciptakan barang yang mempunyai kegunaan (utility) dengan mengadakan perubahan dalam bentuk, menyediakannya dan tempat yang diperlukannya serta dilaksanakan pada waktu yang tepat. Jadi produksi dapat dikatakan sebagai suatu tindakan yang dilakukan untuk menciptakan serta menambah guna suatu barang dan jasa dalam memenuhi kebutuhan manusia.

Dari beberapa pengertian produksi di atas, dapat disimpulkan bahwa pengertian produksi dalam arti teknis adalah suatu usaha manusia untuk menghasilkan barang dan jasa, sedangkan pengertian produksi dalam arti ekonomis yaitu selain usaha untuk menghasilkan barang dan jasa juga harus dipenuhi persyaratan untuk memberikan manfaat bagi manusia. Jadi pengertian produksi dalam arti teknis dikatakan sebagai pengertian produksi dalam arti sempit, sedangkan pengertian produksi dalam arti ekonomis dapat diartikan sebagai produksi dalam arti luas. Oleh karena itu, dalam hubungannya dengan

kelangsungan suatu proses produksi selalu diperlukan faktor-faktor produksi atau sumber daya dalam menghasilkan suatu hasil produksi. Bila dihubungkan dengan usahatani padi, maka modal sebagai faktor penunjang dan tenaga kerja sebagai faktor pelaksana.

Selanjutnya kombinasi antara berbagai input atau produksi di dalam menghasilkan suatu produksi komoditi pertanian, dapat digambarkan suatu fungsi yang disebut fungsi produksi. Fungsi produksi (*production function*) yaitu fungsi yang menunjukkan hubungan antara hasil produksi (*output*) dengan faktor-faktor produksi (*input*). Kombinasi antara berbagai input atau produksi di dalam menghasilkan suatu produksi komoditi pertanian, dapat digambarkan suatu fungsi yang disebut fungsi produksi.

Fungsi produksi adalah suatu persamaan matematis yang menunjukkan jumlah output maksimum yang dapat dicapai atau dihasilkan berdasarkan suatu kelompok input yang dispesifikasikan dengan tingkat teknologi yang berlaku (Winardi, 1990). Fungsi produksi tersebut dapat dinyatakan dalam bentuk persamaan matematika sebagai berikut:

$$Y = f(X_1, X_2, \dots X_n)$$

Dimana:  $Y$  = Hasil produksi fisik

$X_1 \dots X_n$  = Faktor-faktor produksi



Berdasarkan persamaan fungsi produksi tersebut dapat disimpulkan bahwa fungsi produksi menjelaskan adanya hubungan matematika antara sejumlah produksi tertentu dengan input-input (faktor produksi) yang dilibatkan dalam proses produksi. Fungsi produksi tersebut menunjukkan bahwa besarnya jumlah produksi yang dihasilkan tergantung dari banyaknya atau kurangnya faktor produksi (input) yang digunakan dalam proses produksi.

## 2.5 Pengertian Pendapatan

Pendapatan (*income*) adalah hasil uang atau keuntungan materil lainnya yang timbul dari pemakaian kekayaan atau jasa-jasa manusia bebas. Income net (penghasilan bersih) adalah penerimaan kotor dari semua periode dikurangi semua pengeluaran yang dilakukan (Abdurrachman, 1990). Hal yang sama juga dikemukakan oleh (Wahyu, 1990) bahwa pendapatan adalah penghasilan berupa uang atau hasil materil lainnya yang dicapai dari beberapa penggunaan kekayaan akan jasa-jasa manusia bebas.

Kedua pengertian yang dikemukakan para pakar tersebut, sebenarnya mengandung maksud yang sama bahwa pendapatan adalah seluruh hasil yang diperoleh setiap individu atau badan yang disebabkan oleh penggunaan sejumlah barang atau jasa.

Oleh karena itu, berkaitan erat dengan pendapatan nasional yang merupakan nilai produksi barang-barang dan jasa-jasa yang diciptakan untuk

suatu perekonomian dalam masa satu tahun. Dengan demikian, analisa pendapatan nasional merupakan imbalan ekonomi mikro dengan teori harga, dengan sasaran adalah konsumsi perseorangan, aktivitas perusahaan dan sekelompok pasar. Untuk menghitung pendapatan nasional, ada 3 cara yakni:

1. Cara pengeluaran, yaitu dengan menjumlahkan seluruh pengeluaran untuk berbagai golongan pembelian dalam masyarakat yang terdiri dari rumah tangga, pengusaha, pemerintah dan sektor luar negeri (ekspor dan impor).
2. Cara produksi, yaitu dengan menentukan dan menjumlahkan nilai produksi yang dihasilkan oleh sektor produksi yang ada dalam perekonomian pada masa satu tahun.
3. Cara pendapatan, yaitu dengan menjumlahkan faktor-faktor produksi yang dipergunakan dalam memproduksi barang-barang dan jasa-jasa di dalam proses produksi.

Sehubungan dengan penjelasan di atas, maka yang menjadi landasan dalam menghitung pendapatan usahatani padi yang ada di Kecamatan Sesean, yaitu setiap proses produksi dinyatakan dalam satuan rupiah atau dipasarkan. Dengan demikian, akan terlihat berapa besar nilai produksi padi pada setiap proses produksi dan tentunya untuk mendapatkan pendapatan bersih, maka terlebih dahulu harus dikurangkan dengan faktor-faktor produksi yang digunakan dalam proses produksi.



## 2.6 Hipotesis

Berdasarkan uraian di atas maka hipotesis dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Usahatani padi di Desa Tanralili Kecamatan Maru'su sebagai wilayah kerja Sub Dolog Wilayah VII Makassar memberikan keuntungan bagi petani.
2. Sub Dolog Wilayah VII Makassar dalam meningkatkan pendapatan petani padi di Desa Tanralili Kecamatan Maru'su mempunyai peranan dalam pengendalian harga dasar.



### III. METODOLOGI PENELITIAN

#### 3.1 Tempat dan Waktu

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Tanralili Kecamatan Maru'su, Kabupaten Maros, dengan pertimbangan bahwa daerah ini dikenal sebagai pusat pengembangan usahatani padi di Sulawesi Selatan yang termasuk dalam Sub Dolog Wilayah VII Makassar. Penelitian ini dilaksanakan mulai bulan November 2002 sampai Pebruari 2003.

#### 3.2 Penentuan Sampel

Penentuan sampel dilakukan secara acak sederhana (Simple Random Sampling) yaitu dengan mengambil 10 % dari populasi sebanyak 204 petani padi, di mana dalam pemasaran hasil produksinya melalui Sub Dolog Wilayah VII Makassar. Dengan demikian, terpilih 20 petani sebagai responden.

#### 3.3 Pengumpulan Data

Data yang digunakan pada penelitian ini digolongkan dalam dua jenis data yaitu:

1. Data primer yaitu data yang diambil langsung dari petani padi dengan mewawancarai petani dan mengisi kuisisioner yang telah disiapkan.
2. Data sekunder yaitu data yang diambil dari pihak atau instansi terkait seperti pada kantor Statistik dan Dinas Pertanian setempat.

### 3.4 Metode Analisis Data

Untuk menguji hipotesis pertama, maka digunakan analisis pendapatan usahatani padi dengan rumus sebagai berikut:

$$\pi = TR - TC$$

dimana :  $\pi$  = Keuntungan (profit)

TR = Total Penerimaan (revenue)

TC = Total Biaya (cost).

Untuk mendapatkan total penerimaan (TR) dan total biaya (TC) digunakan rumus sebagai berikut:

$$TR = P \times Q$$

$$TC = FC + VC$$

Dimana: P = Harga (Price)

Q = Jumlah (Quantity)

FC = Biaya tetap (Fixed Cost)

VC = Biaya berubah-ubah (Variable Cost)

Selanjutnya untuk menganalisa peranan Sub Dolog Wilayah VII Makassar dalam peningkatan pendapatan petani melalui penetapan harga dasar gabah, digunakan analisis kualitatif yang meliputi analisa peranan dan strategi Sub Dolog Wilayah VII Makassar.

### 3.5 Definisi Operasional

Beberapa batasan atau pengertian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Responden adalah petani padi di Desa Tanralili Kecamatan Maru'su yang termasuk dalam Sub Dolog Wilayah VII Makassar dan terpilih sebagai sampel (orang).
2. Produksi (Q) adalah hasil panen yang diperoleh responden dari usahatani padi dan dinyatakan dalam kilogram.
3. Harga (P) adalah harga dasar gabah yang berlaku pada Sub Dolog Wilayah VII Makassar dan dinyatakan dalam rupiah.
4. Penerimaan (TR) adalah nilai dari jumlah fisik gabah yang diperoleh petani padi sebagai volume produksi dikali dengan harga satuan.
5. Biaya produksi (TC) adalah seluruh biaya (biaya tetap dan biaya variabel) yang dikeluarkan dalam setiap proses produksi usahatani padi.
6. Biaya tetap (FC) adalah biaya yang dikeluarkan oleh responden yang jumlahnya tetap meskipun terjadi perubahan volume kegiatan produksi.
7. Biaya variabel (VC) adalah biaya yang dikeluarkan oleh responden yang sifatnya berubah-ubah yang habis dalam satu kali proses produksi dan mempengaruhi besarnya produksi.



8. Keuntungan atau pendapatan ( $\pi$ ) adalah selisih antara penerimaan dengan besarnya total biaya yang digunakan dalam usahatani padi di Desa Tanralili Kecamatan Maru'su dalam wilayah Sub Dolog VII Makassar.
9. Dolog adalah lembaga pemerintah non Departemen yang menangani masalah pangan khususnya pembelian gabah di daerah atau pada tingkat petani.



## IV. GAMBARAN UMUM SUB DOLOG WILAYAH VII MAKASSAR

### 4.1 Sejarah Singkat Sub Dolog Wilayah VII Makassar

Pembentukan suatu badan yang menangani bahan pangan pokok telah dimulai di Indonesia sejak zaman pemerintahan koloni Belanda dengan dibentuknya Yayasan Bahan Pangan atau "*Voedings Middeen Fonde (VMF)*" pada tanggal 5 April 1939 di bawah pembinaan Departemen Ekonomi. Yayasan ini bertugas melakukan pengadaan dan penyediaan bahan pangan.

Selama masa pendudukan Jepang, VMF dibubarkan dan diganti dengan badan baru bernama "*Sangyobu-NanyoKohatsu*", yang bertugas melakukan pembelian padi dari petani dengan harga yang sangat rendah. Pada masa awal kemerdekaan (1945-1950) dua organisasi didirikan untuk menangani penyediaan dan distribusi pangan yaitu di dalam wilayah RI terdapat Jawatan Pengawasan Makanan Rakyat (JPMR) yang kemudian menjadi Kementerian Penyediaan Makanan Rakyat, sedang di dalam wilayah pendudukan Belanda dihidupkan kembali VMF.

Selama periode awal kemerdekaan 1950-1952, pemerintah mendirikan Yayasan Bahan Makanan (MABA) di bawah pembinaan Departemen Pertanian. Yayasan ini dikelola dan dioperasikan oleh tenaga-tenaga mantan JPMR yang digantikannya, untuk melanjutkan tugas VMF yang sejak semula telah dibantu dengan Kredit dan Bank Indonesia untuk membiayai pengadaan di dalam negeri maupun import.

Melalui SK Menteri Ekonomi No. 1303/M tertanggal 1 Februari 1952, pembinaan BAMA selanjutnya menjadi tanggung jawab Kementerian Ekonomi dan diberi nama baru menjadi Yayasan Urusan Bahan Makanan (YUBM). Dengan timbulnya daerah Swatantra Tingkat I dan II 1956/1957, YUBM diberi kewenangan untuk membentuk yayasan dengan nama Yayasan Badan Pembelian Padi (YBPP) dengan tugas melakukan pembelian padi. Pada perkembangan selanjutnya yayasan ini menjelma menjadi dua badan yang mengurus masalah pangan yaitu:

1. YUBM sebagai aparat pemerintah pusat untuk melaksanakan import pangan dengan pembiayaan kredit dari Bank Indonesia.
2. YBPP sebagai badan (aparat) daerah yang bertugas melakukan pengadaan padi/beras di dalam negeri dengan kredit dari Bank Koperasi Tani dan Nelayan (BKTN, sekarang namanya BRI).

Dualisme kelembagaan ini kemudian diperbaiki pada tahun 1964 melalui keputusan Dewan Bahan Makanan No. 001/SK/DBM/64 tentang pembentukan Badan Pelaksanaan Urusan Pangan (BPUP). Badan baru ini bertugas mengurus penyediaan bahan pangan pokok di seluruh Indonesia melalui kegiatan pengadaan dan penyaluran pangan, menangani pengolahan, pengangkutan, penggudangan dan distribusi.

Ketika situasi kehidupan politik dan ekonomi negara dilanda kekacauan sebagai akibat pemberontakan PKI tanggal 30 September 1965, maka dibentuklah Komando Logistik Nasional (KOLOGNAS) dengan keputusan Presidium Kabinet

Ampera No. 97/1966 tanggal 23 April 1966. Dan pada tanggal 31 Agustus 1966 dengan keputusan Presiden No. 11/Ek/Kep/8/1966, BPUP diintegrasikan kedalam KOLOGNAS dan segala kegiatannya diambil alih oleh KOLOGNAS.

Sementara itu proses kekecauan terus berlanjut dan mencapai puncaknya sehingga hampir menghancurkan sendi-sendi pokok kehidupan bangsa. Pada saat itu segera dihadapkan pada masalah kosongnya stok pangan di gudang-gudang BPUP, habisnya devisa negara dan tingkat inflasi yang membumbung tinggi.

Kebijakan pokok yang dianut oleh pemerintah Orde Baru untuk mengatasi kemelut ekonomi pada tahun 1967 adalah menghilangkan dua sumber pokok inflasi yaitu defisit anggaran dan kredit murah. Masalah beras yang merupakan salah satu penyebab utama inflasi menjadi titik pusat perhatian pemerintah dengan menetapkan bahwa semua arus pembiayaan dikelola secara terpusat dan perencanaan import beras secara bertahap diketatkan. Dengan keputusan Presiden No. 69/1967, KOLOGNAS dibubarkan dan kemudian dibentuk Badan Urusan Logistik (Bulog) melalui keputusan Presiden No. 11/U/Kep/1967 tanggal 10 Mei 1967. Badan baru ini dirancang sebagai Badan Pembeli Tunggal untuk beras (Keppres No. 272/1967) sedangkan Badan Indonesia ditetapkan sebagai Penyandang Dana Tunggal untuk beras (Keppres No. 1/1967).

Dalam menjalankan tugasnya Bulog dibantu oleh Dolog (Depot Logistik) yang merupakan instansi pertikal Bulog di wilayah Propinsi Daerah Tingkat I yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Bulog.



Dolog Propinsi Sulawesi Selatan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi Bulog di Wilayah Propinsi Sulawesi Selatan dengan dibantu oleh sub dolog di beberapa daerah di Sulawesi Selatan. Salah satu di antaranya adalah Sub dolog wilayah VII Makassar berkedudukan di Jalan Urip Sumoharjo Nomor 22.

Adapun kedudukan Sub Dolog Wilayah VII Makassar sesuai dengan pasal 242 yaitu merupakan :

1. Instansi vertikal di Depot Tingkat II/Kabupaten/Kotamadya yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Dolog Propinsi.
2. Sub Dolog dipimpin oleh seorang Kepala yang selanjutnya disebut Ka. Sub Dolog.
3. Dalam melaksanakan tugasnya, Ka. Sub Dolog dibantu oleh wakil kepala yang bertanggung jawab langsung kepada Ka. Sub Dolog.

Sedangkan pasal 244 Bab VIII Surat Keputusan Kabulog No. Kep-234/KA/12/1980 menjelaskan fungsi Sub Dolog sebagai berikut:

- a. Menyusun program dan membina aparatur Bulog di Wilayah kerjanya.
- b. Menganalisa dan melaporkan perkembangan pemerintah dan penawaran harga pasar.
- c. Melaksanakan dan mengendalikan kegiatan pengadaan angkutan, persediaan dan perawatan.
- d. Melaksanakan pembinaan administrasi dan keuangan.
- e. Melaksanakan pembinaan hubungan kerja horisontal di wilayah kerjanya.

Peranan Sub Dolog Wilayah VII Makassar secara umum termaktub pula dalam ketentuan yang dikemukakan tersebut sebagaimana perpanjangan tangan dari pelaksanaan tugas pokok Bulog di daerah-daerah, khususnya daerah tingkat II/Kabupaten/Kotamadya dengan dikoordinir oleh Kepala Dolog di Tingkat Propinsi yang bersangkutan sebagai aparat langsung dari Kepala Bulog.

#### 4.2 Struktur Organisasi

Suatu perusahaan tentu tidak terlepas dengan struktur organisasi yang dapat diartikan sebagai susunan dan hubungan antar bagian dalam suatu organisasi. Suatu struktur organisasi menspesifikasikan pembagian kerja dan menunjukkan bagaimana fungsi atau kegiatan yang berbeda dihubungkan dalam suatu struktur.

Sub Depot Logistik Wilayah VII Makassar dipimpin oleh seorang Kepala yang membawahi Seksi pengadaan, angkutan dan penyaluran, Sub bagian administrasi dan keuangan serta gudang yang masing-masing mempunyai tugas dan wewenang. Pendelegasian tanggung jawab antara atasan dan bawahan dengan pelaporan hasil kerja dari bawah ke atas dilakukan sesuai dengan tingkatan dan urutan yang ada dalam struktur organisasi Sub Depot Logistik Wilayah VII Makassar.

Seksi pengadaan, angkutan dan penyaluran membawahi beberapa sub seksi sedangkan sub bagian administrasi dan keuangan membawahi beberapa urusan-urusan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Lampiran I.

### 4.3 Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab

Adapun tugas, wewenang dan tanggung jawab karyawan/staf pada struktur organisasi adalah sebagai berikut:

#### 1. Kepala

Bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan dan memberikan petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan, serta wajib mengawasi bawahannya, dan bila terjadi penyimpangan wajib mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

#### 2. Seksi Operasi dan Usaha Logistik

Mempunyai tugas melakukan pelaksanaan dan pengendalian pengadaan beras/gabah, Persediaan dan perawatan serta angkutan dan distribusi, analisis harga, pengembangan jasa usaha logistik serta evaluasi dan pelaporan.

Seksi Operasi dan Usaha Logistik menyelenggarakan fungsi-fungsi:

- a. Pengumpulan bahan pelaksanaan dan pengendalian pengadaan gabah/beras dan kerja sama lembaga niaga pangan koperasi dan non koperasi serta angkutan dan distribusi.
- b. Pengumpulan bahan pelaksanaan kegiatan pengelolaan persediaan dan perawatan kualitas.
- c. Pengumpulan bahan pemantauan analisis harga dan pasar.
- d. Pengumpulan bahan pelaksanaan pengembangan jasa logistik dan inventaris.

Seksi Operasi dan Usaha Logistik membawahi :

☞ Sub Seksi Pengadaan, Angkutan dan Distribusi

Mempunyai tugas melakukan pengumpulan bahan pelaksanaan dan pengendalian pengadaan bahan pangan pokok dan bahan lain, penyiapan perjanjian pengadaan, Surat Perintah Pembayaran (SPP), kebutuhan sarana pengadaan, pelaksanaan pengadaan melalui Satuan Tugas (SATGAS), perhitungan kebutuhan alokasi L/C pengadaan, kerjasama lembaga niaga pangan koperasi dan non koperasi, pemuatan dan pembongkaran barang serta penyelesaian administrasi, penyiapan data untuk klaim penyaluran, penyiapan surat perintah setor dan Delivery Order (DO), penyiapan nota tagihan, berita acara penyerahan, daftar penyimpulan, perjanjian jual beli dan konsinyasi serta evaluasi dan pelaporan.

☞ Sub Seksi Penyediaan dan Perawatan

Mempunyai tugas melakukan pengumpulan bahan penyusunan prognosa, laporan ketatalaksanaan, pemeliharaan, perawatan dan pemeriksaan kualitas, pengolahan dan penyosohan kembali, pemberantasan hama, perhitungan dan pengajuan biaya pengelolaan persediaan dan perawatan serta melakukan urusan administrasi serta evaluasi dan pelaporan.

☞ Sub Seksi Harga dan Pasar

Mempunyai tugas melakukan pengumpulan bahan pengamatan dan pelaporan perkembangan harga dan pasar bahan pangan pokok dan komoditas lainnya yang dimonitor Sub Dolog serta pengolahan dan



penyajian data statistik harga dan pasar serta kegiatan operasional Sub Dolog serta evaluasi dan pelaporan.

#### ☛ Sub Usaha Logistik

Mempunyai tugas melakukan pengumpulan bahan urusan pengembangan jasa logistik dan inventaris serta evaluasi dan pelaporan.

### 3. Seksi Keuangan dan Sumber Daya Manusia

Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan pengelolaan anggaran dan pembiayaan serta membuat laporan pertanggungjawaban keuangan Sub Dolog, serta urusan administrasi sumber daya manusia, hukum serta evaluasi dan pelaporan.

Seksi keuangan dan sumber daya manusia menyelenggarakan fungsi:

- a. Pengumpulan bahan pengelolaan dan pengalokasian anggaran dan pembiayaan.
- b. Pengumpulan bahan pembukuan, laporan pertanggungjawaban keuangan dan hubungan rekening koran (R/K).
- c. Pengumpulan bahan urusan hukum dan SDM.

Seksi Keuangan dan Sumber Daya Manusia membawahi:

#### ☛ Sub Seksi Keuangan

Mempunyai tugas melakukan pengumpulan bahan pengelolaan dan pengalokasian anggaran pendapatan dan pembiayaan, urusan pembayaran, surat perintah pemindahbukuan, surat perintah setor, penagihan dan

pelaksanaan administrasi pertanggungjawaban keuangan serta evaluasi dan laporan.

☞ Sub Seksi Akuntansi

Mempunyai tugas melakukan pengumpulan bahan laporan pertanggungjawaban keuangan Sub Dolog serta meneliti dokumen dan bukti-bukti transaksi untuk sahnyanya penerimaan dan atau pembayaran, pelaksanaan pembukuan keuangan, penyusunan neraca defisit surplus serta evaluasi dan pelaporan.

☞ Sub Seksi Hukum dan Sumber Daya Manusia

Mempunyai tugas melakukan pengumpulan bahan rumusan penyelesaian masalah hukum, pelaksanaan klaim dan pengelolaan sumber daya manusia serta evaluasi dan pelaporan.

4. Urusan Tata Usaha dan Umum

Berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Sub Depot Logistik, secara teknis dan operasional berada di bawah pembinaan Kepala Seksi Keuangan dan Sumber Daya Manusia.

Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan urusan surat menyurat, arsip, ekspedisi, hubungan masyarakat, umum dan kerumahtanggaan serta evaluasi dan pelaporan.

#### 4.4 Fungsi Sub Dolog Wilayah VII Makassar

Sub Dolog Wilayah VII Kota Makassar dilihat dari letak dan kedudukannya adalah merupakan wilayah kerja yang cukup strategis, dimana mengkoordinir beberapa kabupaten yaitu; Pangkep, Maros, Gowa, Takalar dan Makassar. Jadi sistem pengadaan yang dipergunakan dalam lingkungan kerja Sub Dolog Wilayah VII berdasarkan instruksi Ka. Bulog No. INS-14/KA/12/1991 sebagai berikut:

- a. Pengadaan pangan/pengumpulannya melalui koperasi Unit Desa (KUD).
- b. Pengadaan pangan/pengumpulannya melalui Koperasi Non KUD.
- c. Pengadaan melalui Satuan Tugas (Satgas) pengadaan yaitu: satuan tugas ke daerah-daerah yang disebut pengadaan operasional Dolog/SubDolog/ Perwakilan yang dilakukan dengan izin khusus.

Sedangkan sistim penyaluran beras yang dilakukan Sub Dolog Wilayah VII Kota Makassar untuk memenuhi kebutuhan berbagai daerah dan badan usaha seperti, Anggota ABRI, Pegawai Negeri/Daerah dan Badan Usaha Milik Negara/ Daerah, sebagaimana yang tercantum dalam SK Presiden No. 9 tahun 1982, tanggal 1 Maret 1982, disamping itu juga melayani masyarakat pada umumnya.

Meskipun secara penyaluran/penyerahan beras kepada berbagai golongan tersebut pada prinsipnya sama yaitu harus didasarkan "Prinlog" (perintah Logistik). Namun dalam prosedur pelaksanaannya mempunyai perbedaan antara satu dengan yang lain, terutama harga beras yang disalurkan dan syarat-syarat pembayarannya. Untuk memperoleh pelayanan terhadap permintaan dari setiap golongan, maka konsumen beras dibagi menjadi dua golongan besar yaitu :



- Golongan anggaran adalah setiap golongan konsumen beras dimana dalam hal transaksi jual-beli didasarkan pada ketentuan-ketentuan secara kebijaksanaan pemerintah, terutama mengenai harga dan cara penyerahan dan pembayarannya. Golongan ini merupakan golongan dimana pembayaran jatah besarnya dibiayai oleh Direktorat Jenderal Anggaran termasuk didalamnya adalah ADRI, AURI, ALRI, Polri, Depsos, Pegawai Negeri Sipil, dan karyawan Bulog. Cara penyerahannya adalah penyerahan sampai di atas sarana angkutan dengan jumlah penyerahan sesuai dengan berat yang tercantum dalam surat perjanjian jual beli beras termasuk pembungkus.
- Golongan Non Anggaran yaitu berdasarkan Kepres RI No. 9 tahun 1982 tanggal 1 Maret 1982, maka perusahaan/Badan Usaha Milik Negara/Daerah yang memberi tunjangan pangan dalam bentuk natura (beras) kepada pegawai perusahaan beserta keluarganya. Sistem penyerahan/penyaluran beras yang berlaku pada Sub Dolog Wilayah VII Makassar didasarkan atas kontrak selama satu tahun anggaran, dimana kebutuhannya diajukan setiap kwartel berdasarkan surat permintaan. Bolog menerbitkan Prinlog dan Dolog/Sub Dolog menerbitkan DO sejumlah keperluan setiap bulannya atau sekaligus setiap kwartal. Setelah itu dibuatkan berita acara dan kemudian dikirim ke Bulog sebagai bahan penagihan kepada penerima/PN Pertamina.

Badan Urusan Logistik mempunyai tugas utama untuk mengadakan stabilisasi harga pangan/beras. Sebagai pelaksana tugas pokok ini dilakukan di daerah-daerah oleh Dolog/Sub Dolog dengan tugas pokok adalah mengadakan



stabilitas harga pangan/beras di daerah dengan jalan memperhatikan harga antara “Floor Price” dan “Ceiling Price” atau mempertahankan harga antara minimum dan maksimum.

Untuk penyelenggaraan tugas-tugas tersebut, maka Sub Dolog Wilayah VII Makassar melaksanakan fungsinya.

1. Dalam bidang sembilan bahan pokok, membantu terlaksananya usaha-usaha pemerintah untuk menstabilkan harga-harga sembilan bahan pokok dengan cara:
  - a. Mengkoordinir pelaksanaan kebijaksanaan pemerintah untuk mengamankan atau menyelamatkan sesuatu ke dalam bidang logistik sembilan bahan pokok.
  - b. Mengikuti dengan seksama perkembangan dan keadaan harga-harga sembilan bahan pokok dalam rangka hubungannya masing-masing dan dalam hubungannya dengan barang-barang lain serta menyampaikan saran-saran pertimbangan kepada pemerintah untuk mencapai stabilisasi harga yang mantap.
2. Dalam bidang pemberasan, membantu terlaksananya usaha pemerintah untuk meningkatkan produksi dan kelancaran pemasaran beras dengan cara:
  - a. Melakukan pengendalian dan pelaksanaan kebijaksanaan pemerintah di bidang pengadaan dan penyaluran kepada berbagai golongan yang memerlukan dan penyediaan “buffer stock”.

- b. Turut membantu usaha-usaha pemerintah dalam menggerakkan usaha-usaha swasta dalam hal perdagangan beras seperti pengolahan, pergudangan, standarisasi, kualitas dan lain-lain.

Dalam hal meningkatkan kehidupan perekonomian masyarakat, koperasi merupakan salah satu wadah untuk kekuatan ekonomi lemah. Maka dengan demikian pemerintah bermaksud agar KUD/BUUD dapat berfungsi dengan baik serta dapat memberikan kesempatan kerja bagi masyarakat pedesaan sekaligus dapat meningkatkan hasil produksi beras dalam negeri.

Kebijaksanaan pemerintah melibatkan KUD/BUUD di pedesaan-pedesaan adalah sangat bermanfaat terutama dalam hal berkurangnya pengangguran, meningkatkan mekanisme pengadaan dan penyaluran, menambah keterampilan masyarakat di pedesaan serta dapat menciptakan kesejahteraan warga pedesaan.

Sebagai konsekwensi logis dari hal tersebut di atas maka tugas pokok dari Sub Dolog Wilayah VII Makassar adalah sebagai penyelenggara secara terus menerus, harus diwadahkan dalam suatu organisasi, oleh sebab itu organisasi Sub Dolog Wilayah VII Makassar sebagai pelaksana urusan logistik di daerah-daerah sebagai pengumpul (pengadaan) dan penyaluran beras di Sulawesi Selatan.

## V. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### 5.1 Identitas Responden

Identitas petani responden dalam penelitian meliputi umur, tingkat pendidikan, jumlah tanggungan keluarga, pengalaman berusahatani, dan luas lahan usahatani.

#### 5.1.1 Umur

Umur petani berkaitan erat dengan pola pikir serta kemampuan fisik yang dapat mempengaruhi keberhasilan dalam mengelola cabang usahatani. Petani berusia muda dan sehat mempunyai kemampuan fisik dan lebih cepat menerima teknologi baru yang dianjurkan. Sebaliknya petani berusia lebih tua mempunyai banyak pertimbangan dalam menerima teknologi baru. Adapun tingkat umur petani responden yang mengelola usahatani padi di Desa Tanralili Kecamatan Maru'su tahun 2003 dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Tingkat Umur Petani Responden di Desa Tanralili, Kecamatan Maru'su, 2003

No.	Tingkat Umur Responden (tahun)	Jumlah (orang)	Persentase (%)
1.	25 – 34	5	25
2.	35 – 44	5	25
3.	45 +	10	50
Total		20	100
Rata-rata umur petani		44	

Sumber : Analisis Data Primer, 2003

Pada Tabel 1, menunjukkan bahwa tingkat umur petani responden di Desa Tanralili, Kecamatan Maru'su dalam usahatani padi berbeda-beda, di mana persentase umur yang terbesar berada pada interval 45 tahun ke atas yakni 10 orang atau 50 persen, sedangkan yang terendah berada pada interval 25-34 dan 35-44 tahun yakni masing-masing sebanyak 5 orang atau 20 persen. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat umur responden umumnya tergolong produktif yang memiliki pola pikir dan kemampuan fisik yang cukup memadai dalam mengelola usahatannya, di mana petani merubah pola pikir dari sistem berusahatani tradisional menjadi intensif terutama dalam penggunaan sarana produksi dan teknik berusahatani padi yang baik. Begitu pula dalam kemampuan fisik, semakin bertambah umur seorang petani cenderung semakin tinggi tingkat produktivitas kerjanya, tetapi kemampuan tersebut mempunyai titik jenuh yakni setelah umur petani mencapai titik jenuh maka kemampuannya akan menurun.

### **5.1.2 Tingkat Pendidikan**

Tingkat pendidikan formal yang pernah diperoleh responden akan membentuk watak, cara berfikir serta pola berusahatani yang dilakukan oleh petani dan tentunya akan berpengaruh terhadap peningkatan produksi, baik kuantitas maupun kualitas. Petani yang tidak memiliki pendidikan formal umumnya mereka tidak dapat mengadopsi secara maksimal kemajuan-kemajuan teknologi di bidang usahatani padi.



Studi ini mengelompokkan pendidikan dalam tiga kategori yaitu: pendidikan atas (tidak tamat dan SD), pendidikan menengah (SLTP dan SLTA), dan pendidikan tinggi (Perguruan Tinggi). Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Tingkat Pendidikan Petani Responden dalam Usahatani Padi di Desa Tanralili Kecamatan Maru'su, 2003

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah (orang)	Persentase (%)
1.	Rendah	7	35
2.	Menengah	11	55
3.	Tinggi	2	10
T o t a l		20	100

Sumber : Analisis Data Primer, 2003

Pada Tabel 2 menunjukkan bahwa persentase tingkat pendidikan responden yang terbesar adalah tingkat pendidikan menengah (SLTP dan SLTA) sebanyak 11 orang atau 55 persen. Hal ini menunjukkan bahwa umumnya responden di Desa Tanralili Kecamatan Maru'su tingkat pendidikan formal yang cukup dalam pengelolaan usahatani padi. Namun demikian, keberhasilan responden tidak hanya ditunjang oleh pendidikan formal saja, tetapi pendidikan non formal pun sangat berpengaruh seperti mendengarkan penyuluhan serta mengadakan studi banding yang ada kaitannya dengan

usahataniya agar petani mengetahui kekurangan dan kelemahan di dalam mengelola usahataniya.

### 5.1.3 Jumlah Tanggungan Keluarga

Tuntutan pemenuhan kebutuhan hidup bagi keluarga akan merupakan suatu motivator untuk meningkatkan produktifitas kerja dengan tujuan memaksimalkan pendapatan usahatani padi. Makin besar tanggungan keluarga, tentunya semakin besar pula biaya yang dibutuhkan petani untuk memenuhi kebutuhan konsumsi sehari-hari, dilain pihak makin besar pula sumber tenaga kerja yang tersedia.

Jumlah tanggungan keluarga responden di Desa Tanralili Kecamatan Maru'su tahun 2003 dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel 3. Jumlah Tanggungan Keluarga Responden dalam Usahatani Padi di Desa Tanralili Kecamatan Maru'su, 2003

No.	Jumlah Tanggungan (orang)	Jumlah (orang)	Persentase (%)
1.	2 – 3	6	30
2.	4 – 5	10	50
3.	6 – 7	4	20
T o t a l		20	100
Rata-rata		4,4	

Sumber : Analisis Data Primer, 2003

Pada Tabel 3 menunjukkan bahwa jumlah tanggungan responden pada sistem pengelolaan usahatani padi yang berbeda, di mana persentase jumlah tanggungan responden yang terbesar berada pada interval 4 - 5 yakni sebanyak 10 orang atau 50 persen, sedangkan jumlah tanggungan terendah berada pada interval 6 - 7 yakni sebanyak 4 orang atau 20 persen. Hal ini berarti terdapat lebih banyak responden yang memiliki beban moral dan tanggung jawab untuk menghidupi istri dan anaknya, namun demikian tenaga kerja tetap tersedia dalam mengelola usahatani untuk memaksimalkan produksi usahatani padi mereka.

#### 5.1.4 Pengalaman Berusahatani

Pengalaman berusahatani padi mempunyai peranan dalam keberhasilan pengelolaan usahatani, dimana lamanya waktu yang telah dilalui dalam mengelola usahatani akan menambah kematangan bagi petani padi dan akan lebih tanggap dalam mengambil keputusan. Kegagalan yang dialami dalam pengelolaan usahatani akan merupakan suatu pengalaman berharga dalam mengendalikan usahatannya, demikian pula dengan keberhasilan yang telah diraihnyanya tentu akan memberikan semangat berusaha yang tinggi.

Pengalaman berusahatani yang dimiliki responden dalam mengelola usahatani padi di Desa Tanralili Kecamatan Maru'su tahun 2003 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4. Pengalaman Responden dalam Usahatani Padi di Desa Tanralili Kecamatan Maru'su, 2003

No.	Pengalaman Berusahatani (tahun)	Jumlah (orang)	Persentase (%)
1.	2 - 6	7	35
2.	7 - 11	10	50
3.	12 - 16	3	15
T o t a l		20	100
Rata-rata		8,05	

Sumber : Analisis Data Primer, 2003

Pada Tabel 4 menunjukkan bahwa persentase pengalaman berusahatani yang terbesar berada pada interval 7 – 11 tahun yakni sebanyak 10 orang atau 50 persen, sedangkan persentase pengalaman berusahatani yang terendah berada pada interval 12 - 16 yakni sebanyak 3 orang atau 15 persen. Hal ini berarti responden umumnya memiliki pengalaman berusahatani padi yang cukup memadai terutama dalam mengubah pola usahatannya atau cara berfikirnya dalam melakukan pendekatan teknologi baru.

### 5.1.5 Luas Lahan Garapan

Luas lahan garapan merupakan hal terpenting di dalam meningkatkan produksi suatu usahatani. Bagi petani, lahan usahatani merupakan indikator produksi dan pendapatan mereka. Luas lahan usahatani padi yang dimiliki responden di Desa Tanralili Kecamatan Maru'su tahun 2003 dapat dilihat pada Tabel 5.



Tabel 5. Luas Lahan yang Dimiliki Responden dalam Usahatani Padi di Desa Tanralili Kecamatan Maru'su, 2003

No.	Luas Lahan (hektar)	Jumlah (orang)	Persentase (%)
1.	1,5 – 2,2	4	20
2.	2,3 – 3,0	9	45
3.	3,1 – 4,8	7	35
T o t a l		20	100
Rata-rata		3,31	

Sumber : Analisis Data Primer, 2003

Pada Tabel 5 menunjukkan bahwa luas lahan garapan yang dimiliki responden berbeda, di mana persentase luas lahan yang terbesar berada pada interval 2,3 – 3,0 hektar yakni sebanyak 9 orang atau 45 persen, sedangkan persentase luas lahan yang terendah berada pada interval 1,5 – 2,2 yakni sebanyak 4 orang atau 20 persen. Hal ini berarti responden umumnya memiliki luas lahan garapan di atas 2,3 hektar, namun pun demikian usaha ekstensifikasi tetap ditingkatkan untuk memperoleh produksi yang lebih banyak.

## 5.2 Produksi

Produksi merupakan jumlah fisik gabah yang diperoleh petani sebagai hasil panen selama satu kali proses produksi dan dinyatakan dalam kilogram. Jumlah produksi yang diperoleh petani padi di Desa Tanralili Kecamatan Maru'su selama satu kali proses produksi beda-beda, dan hal ini bergantung luas lahan yang dimiliki petani.

Jumlah produksi pada usahatani padi di Desa Tanralili Kecamatan Maru'su tahun 2003 dapat dilihat pada Tabel 6.

Tabel 6. Jumlah Produksi yang Diperoleh Responden di Desa Tanralili Kecamatan Maru'su, 2003

No.	Jumlah Produksi (kg)	Jumlah (orang)	Persentase (%)
1.	2.000 – 4.500	5	25
2.	5.000 – 7.500	9	45
3.	8.000 – 10.500	6	30
T o t a l		20	100
Rata-rata		2.039 per hektar	

Sumber : Analisis Data Primer, 2003

Pada Tabel 6 menunjukkan bahwa jumlah produksi yang diperoleh responden berbeda, di mana persentase jumlah produksi yang terbesar berada pada interval 5.000 – 7.500 kg yakni sebanyak 9 orang atau 45 persen, sedangkan persentase jumlah produksi yang terendah berada pada interval 2.000 – 4.500 kg yakni sebanyak 5 orang atau 25 persen. Rata-rata produksi padi per hektar sebanyak 2.039 kg

### 5.3 Analisis Biaya Usahatani Padi

Analisis biaya usahatani padi adalah suatu alat analisis yang digunakan untuk mengetahui berapa besar tingkat biaya yang dikeluarkan oleh responden selama satu kali musim panen. Biaya-biaya tersebut meliputi biaya variabel

### 5.3 Analisis Biaya Usahatani Padi

Analisis biaya usahatani padi adalah suatu alat analisis yang digunakan untuk mengetahui berapa besar tingkat biaya yang dikeluarkan oleh responden selama satu kali musim panen. Biaya-biaya tersebut meliputi biaya variabel yakni biaya benih, pupuk, pestisida, biaya pengairan dan biaya tenaga kerja, dan biaya tetap yakni biaya pajak lahan, penyusutan alat dan sewa traktor. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 7.

Tabel 7. Analisis Rata-rata Biaya Usahatani Padi Per Musim Tanam di Desa Tanralili Kecamatan Maru'su, 2003

No.	Uraian	Biaya Usahatani (Rp/hektar)
1.	Biaya variabel (VC):	
	a. Benih:	72.863,-
	b. Pupuk:	
	- Urea	224.000,-
	- TSP	249.750,-
	- KCI	315.000,-
	c. Pestisida	
	- Decis	38.588,-
	d. Pengairan	28.706,-
	e. Tenaga kerja	150.000,-
	Jumlah Biaya Variabel	1.078.907,-
2.	Biaya tetap (FC):	
	a. Pajak	25.000,-
	b. Penyusutan alat	34.196,-
	c. Sewa traktor	350.000,-
	Jumlah Biaya Tetap	409.196,-
	Total Biaya (TC = VC + FC)	1.488.103,-

Sumber : Hasil analisis



Pada Tabel 7 menunjukkan bahwa jumlah rata-rata biaya variabel usahatani padi di Desa Tanralili Kecamatan Maru'su per musim tanam per hektar sebesar Rp 1.078.907, sedangkan jumlah rata-rata biaya tetap usahatani padi di Desa Tanralili Kecamatan Maru'su per musim tanam per hektar sebesar Rp 409.196. Dengan demikian, maka total biaya usahatani padi per musim tanam per hektar di Desa Tanralili Kecamatan Maru'su tahun 2003 adalah sebesar Rp 1.488.103. Besarnya biaya yang dikeluarkan oleh petani responden disebabkan sistem pengelolaan dengan pendekatan teknologi menuntut penggunaan biaya yang lebih besar pula terutama kebutuhan pupuk urea 140 kg, KCl 150 kg, TSP 135 kg per hektar, begitu pula penggunaan decis bila terjadi serangan hama dan penyakit di pertanaman.

#### **5.4 Analisis Pendapatan Usahatani Padi**

Analisis pendapatan digunakan untuk mengetahui tingkat keuntungan yang diterima oleh responden selama satu kali proses produksi di Desa Tanralili Kecamatan Maru'su yang termasuk dalam Sub Dolog Wilayah VII Makassar. Harga gabah pada tingkat petani di Sulawesi Selatan adalah Rp 1.000 per kilogram setara GKP, sedangkan harga dasar Gabah Kering Giling petani oleh Sub Dolog per kilogram adalah Rp. 1.519,-. Harga gabah pada tingkat petani tidak sesuai dengan yang ditetapkan oleh Sub Dolog karena yang langsung membeli gabah ke petani adalah KUD binaan Sub Dolog. Adapun analisis tingkat pendapatan yang diperoleh responden dari usahatani padi di Desa Tanralili Kecamatan Maru'su tahun 2003 dapat dilihat pada Tabel 8.



Tabel 8. Perbandingan Rata-rata Pendapatan Petani Melalui Penjualan Harga Pasar dan Harga Dolog, 2003

No	Uraian	Nilai Per Hektar pada Harga Pasar (Rp)	Nilai Per Hektar pada Harga Dolog (Rp)
1.	Total Penerimaan(TR): - Jumlah produksi (Q) - Harga (P)	4.078.431,- 4.078 kg 1.000,-	6.194.482,- 4.078 kg 1.519,-
2.	Biaya :		
	a. Biaya variabel	1.078.907,-	1.078.907,-
	b. Biaya tetap	409.196,-	409.196,-
	Total Biaya (TC)	1.488.103,-	1.488.103,-
3.	Laba (keuntungan) ( $\pi = TR - TC$ )	2.590.328,-	4.706.379,-
4.	R/C-Ratio	2,74	4,16
5.	Selisih pendapatan a/t Hg.Dolog & Hg.pasar		2.116.051,-

Sumber : Hasil analisis

Pada Tabel 8 menunjukkan bahwa rata-rata tingkat pendapatan (keuntungan) yang diperoleh petani padi dalam satu kali musim panen per hektar di Desa Tanralili, Kecamatan Maru'su sebagai wilayah kerja Sub Dolog wilayah VII Makassar adalah sebesar Rp 2.590.328,- pada harga pasar dan Rp 4.706.379,- pada harga dolog. Sedangkan R/C-ratio yang diperoleh dalam usahatani padi adalah untuk harga pasar sebesar 2,74 dan harga dolog sebesar 4,16. Hal ini berarti usahatani padi di Desa Tanralili, baik berdasarkan harga pasar maupun harga dolog layak untuk diusahakan.

Bila dihubungkan jumlah tanggungan keluarga petani responden yakni rata-rata 4,4 dengan tingkat pendapatan setiap kali musim panen, menunjukkan bahwa besarnya nilai tanggungan setiap orang dalam keluarga adalah rata-rata sebesar Rp 98.118 per bulan dari pendapatan petani pada luas lahan 1 ha.

Keuntungan yang diperoleh dalam usahatani padi tersebut dianggap masih kurang untuk memenuhi kebutuhan hidup petani dan keluarganya. Hal ini menunjukkan bahwa peranan sub dolog Wilayah VII Makassar dalam mengendalikan harga dasar gabah belum mampu meningkatkan pendapatan petani padi di Desa Tanralili Kecamatan Marusu.

Meskipun Sub Dolog Wilayah VII Makassar telah menetapkan harga gabah yang layak ditingkat petani yakni Rp 1.519, namun harga gabah yang berlaku ditingkat petani hanya sebesar Rp 1.000,-. Terjadinya selisih harga gabah ini karena adanya pedagang perantara yaitu KUD binaan Sub Dolog yang langsung membeli kepada petani dengan harga murah. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun Sub Dolog telah menentukan Harga Dasar Gabah, tetapi petani tidak bisa menikmatinya, atau dengan kata lain kebijakan tersebut pada kenyataannya belum menyentuh kepentingan masyarakat. Hal ini juga ditunjukkan adanya selisih pendapatan antara harga dolog dan harga pasar yang cukup besar yaitu Rp 2.116.051,- dan nilai ini merupakan kehilangan pendapatan yang semestinya diperoleh petani.

Sub Dolog melakukan pembelian padi petani melalui KUD binaan Sub Dolog yang tersebar di beberapa daerah Wilayah VII Sub Dolog. Hal ini dilakukan agar petani tidak lagi mengeluarkan biaya, baik biaya transportasi maupun biaya-biaya lainnya. Harga gabah yang dibeli sub dolog dari petani dianggap wajar atau layak oleh Sub Dolog karena dengan harga gabah yang ditetapkan Sub Dolog maupun KUD binaannya tersebut, petani masih mendapatkan keuntungan. Sub Dolog belum memikirkan tingkat pendapatan yang diperoleh petani per bulan masih sangat rendah dengan banyaknya beban tanggungan keluarga.

Dengan demikian, peranan Sub Dolog Wilayah VII Makassar dalam upaya perlindungan terhadap kemerosotan harga pasar pada musim panen melalui operasi pembelian gabah belum terlaksana dengan baik, sehingga pada akhirnya petani tidak dapat meningkatkan pendapatannya melalui kebijakan tersebut.

### **5.5 Strategi dan Proses Pembelian Gabah oleh Sub Dolog Wilayah VII Makassar**

Berdasarkan sistem dan persyaratan pembelian gabah seperti tersebut di atas, maka besarnya pengadaan/pembelian gabah oleh Sub Dolog Wilayah VII Makassar yang meliputi lima daerah yakni Kabupaten Pangkep, Maros, Makassar, Gowa, dan Takalar, dapat dilihat pada tabel berikut ini.



Tabel 9. Pembelian Gabah Sub Dolog Wilayah VII Makassar Berdasarkan Wilayah Kerja Selama Tahun 2002

No.	Sub Dolog Wil. VII Makassar	Pembelian (ton)	Persentase
1.	Kabupaten Maros	97.077	46,36
2.	Kabupaten Pangkep	29.299	13,99
3.	Kota Makassar	17.900	8,55
4.	Kabupaten Gowa	54.152	25,86
5.	Kabupaten Takalar	10.951	5,23
T o t a l		209.379	100,00

Sumber: Kantor Sub Dolog Wilayah VII Makassar, 2003

Pada tabel tersebut di atas, menunjukkan bahwa jumlah pembelian gabah terbesar oleh Sub Dolog Wilayah VII Makassar adalah Kabupaten Maros yakni sebanyak 97.077 ton atau 46,36 %, sedangkan proporsi pembelian yang terkecil adalah Kota Makassar yang hanya 10.951 ton atau 5,23 % dari total pembelian Sub Dolog Wilayah VII Makassar.

Selanjutnya pengadaan/pembelian gabah oleh Sub Dolog Wilayah VII Makassar mengalami peningkatan selama tahun 1995-2002 dengan rata-rata peningkatan 155.908 ton per tahun, seperti terlihat pada tabel berikut ini.



Tabel 10. Pengadaan Beras Sub Dolog Wilayah VII Makassar Selama Tahun 1995-2002

Tahun	Harga Beli/Harga Dasar Gabah	Pengadaan Beras (ton)			
		KUD	Non KUD	Satgas	Jumlah
1995	400 / 657	83575	12466	3546	99587
1996	450 / 738	104129	12606	3768	120503
1997	525 / 856	120820	14471	4038	139329
1998	1.125 / 1.460	126934	17328	4542	148804
1999	1.200 / 1.610	132175	19402	5089	156666
2000	1.400 / 1.750	152500	20516	5206	178222
2001	1.500 / 1.900	168500	21682	4595	194777
2002	1.000 / 1.519	180592	24760	4027	209379
Rata-rata		133653	17904	4351	155908
Persentase		85,73	11,48	2,79	100,00

Sumber: Sub Dolog Wilayah VII Makassar.

Berdasarkan tabel tersebut di atas, terlihat bahwa realisasi pengadaan beras Sub Dolog Wilayah VII Makassar relatif meningkat setiap tahun seiring dengan peningkatan kebijaksanaan kenaikan harga dasar gabah dan harga beli beras. Pengadaan beras tersebut, terlihat yang berasal dari Koperasi 85,73 %, non KUD diperoleh 11,48 %, dan dari Satuan Tugas (Satgas) diperoleh 2,79 % dari total pengadaan beras Sub Dolog Wilayah VII Makassar.

Berdasarkan data tersebut di atas menunjukkan bahwa utamanya saat panen raya dapat dikendalikan menjadi di atas atau di bawah harga yang ditetapkan. Terkendalinya harga dasar gabah tersebut ditunjang oleh beberapa faktor, yakni:

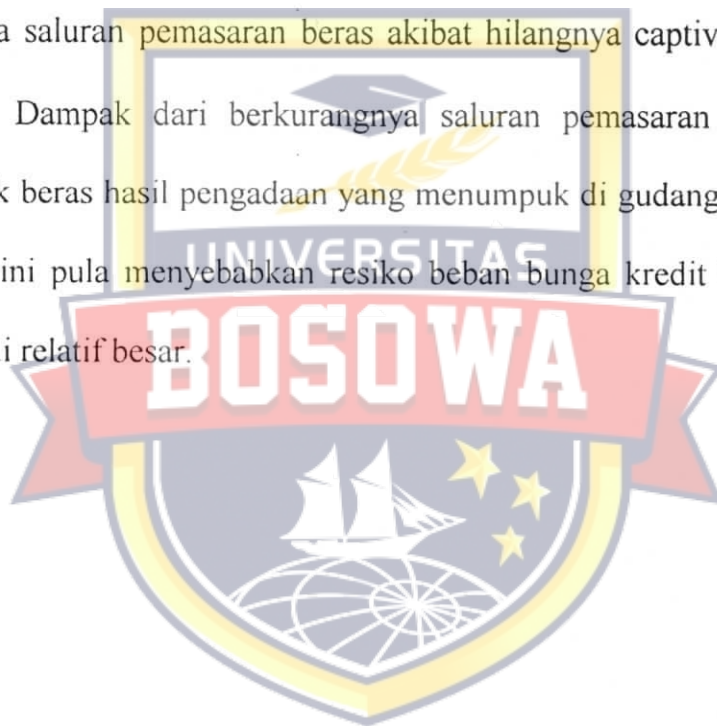
1. Aktivitas perdagangan beras antar pulau yang cukup lancar dalam memasarkan kelebihan/surplus produksi beras.
2. Tersedianya dana pengadaan beras yang relatif cukup yang disediakan Pemerintah untuk pembelian sebagian surplus produksi beras.

Dalam rangka memberikan perlindungan harga kepada petani padi, maka Sub Dolog Wilayah VII Makassar melakukan beberapa upaya/strategi sebagai berikut:

1. Melakukan pengadaan gabah dengan harapan dampaknya secara efektif dapat langsung dirasakan oleh petani mengingat selama ini petani cenderung menjual hasil produksinya dalam bentuk gabah. Hal ini dimaksudkan juga sebagai upaya untuk meminimalisasi kemungkinan masuknya beras impor.
2. Menerjunkan Satuan Tugas (Satgas) pengadaan ke daerah-daerah sentra produksi pada wilayah kerjanya untuk melakukan operasi pembelian gabah langsung dari petani. Melalui upaya tersebut diharapkan dapat membantu aktivitas pemasaran gabah petani di mana-mana pada awal-awal panen raya.

3. Dalam rangka membantu pelaksanaan stabilitas harga dasar gabah di daerah Sulawesi Selatan, maka Sub Dolog Wilayah VII Makassar bersama-sama KUD, Non KUD dan Satgas melakukan pembelian/pengadaan beras pada Wilayah kerjanya.
4. Dalam rangka mengurangi jumlah beras impor yang masuk ke pasaran dalam negeri, maka Sub Dolog Wilayah VII Makassar bersama-sama Dolog Sulawesi Selatan telah melakukan negosiasi untuk menunda kedatangan beras impor, dengan tujuan agar tidak berdampak negatif terhadap harga gabah ditingkat petani.
5. Sub Dolog Wilayah VII Makassar bersama-sama Dolog Sulawesi Selatan meminta kepada Pemerintah melalui Dirjen Bea Cukai untuk melakukan perubahan terhadap ketentuan impor beras agar dapat mengurangi impor beras yang masuk ke Indonesia. Dengan demikian, telah memberikan hasil yang cukup positif ditunjukkan oleh adanya indikasi semakin berkurangnya beras impor yang beredar di Sulawesi Selatan.
6. Untuk beroperasi, Sub Dolog Wilayah VII Makassar menggunakan kredit komersial yang jumlah relatif besar sehingga dapat dipersiapkan proses pelaksanaan pengadaan beras guna melindungi harga gabah petani berjalan sebagaimana mestinya.

Strategi-strategi yang dilakukan tersebut di atas, telah terlaksana sesuai yang diinginkan yakni harga gabah ditingkat petani sudah mulai membaik dan meningkat mendekati harga dasar yang ditetapkan oleh pemerintah. Namun pun demikian masih terdapat kendala yang dihadapi Sub Dolog Wilayah VII Makassar dalam pelaksanaan pengadaan guna stabilitas harga dasar gabah, yaitu berkurangnya saluran pemasaran beras akibat hilangnya captive market (pegawai negeri). Dampak dari berkurangnya saluran pemasaran tersebut menyebabkan stock beras hasil pengadaan yang menumpuk di gudang menjadi sangat besar. Hal ini pula menyebabkan resiko beban bunga kredit komersil ditanggung menjadi relatif besar.





## VI. KESIMPULAN DAN SARAN

### 6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan maka ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Rata-rata tingkat pendapatan (keuntungan) yang diperoleh petani padi selama satu kali musim tanam di Desa Tanralili Kecamatan Maru'su sebagai wilayah kerja Sub Dolog wilayah VII Makassar adalah sebesar Rp 2.590.328,- dengan R/C-ratio yang diperoleh dalam usahatani padi adalah sebesar 2,74 berarti usahatani padi di Desa Tanralili Kecamatan Maru'su layak untuk diusahakan.
2. Peranan Sub Dolog dalam menetapkan harga dasar gabah ditingkat petani belum efektif karena harga yang ditetapkan Sub Dolog sebesar Rp 1.519,- namun yang berlaku ditingkat petani hanya sebesar Rp 1.000,-. Meskipun usahatani padi memberikan keuntungan, tetapi petani tidak bisa menikmatinya, atau dengan kata lain kebijakan sub dolog tersebut pada kenyataannya belum menyentuh kepentingan masyarakat. Hal ini ditunjukkan adanya selisih pendapatan antara harga dolog dan harga pasar yang cukup besar yakni Rp 2.116.051,- dan nilai ini merupakan kehilangan pendapatan yang semestinya diperoleh petani.

3. Sub Dolog Wilayah VII Makassar di Desa Tanralili belum berperan secara optimal dalam memberikan perlindungan kepada petani dari kemerosotan harga pasar pada musim panen raya, meskipun sub dolog telah melaksanakan operasi pembelian/pengadaan dari petani agar petani di Desa Tanralili mendapatkan jaminan harga minimal sama dengan harga dasar yang ditetapkan Pemerintah melalui Instruksi Presiden.

## 6.2 Saran-Saran

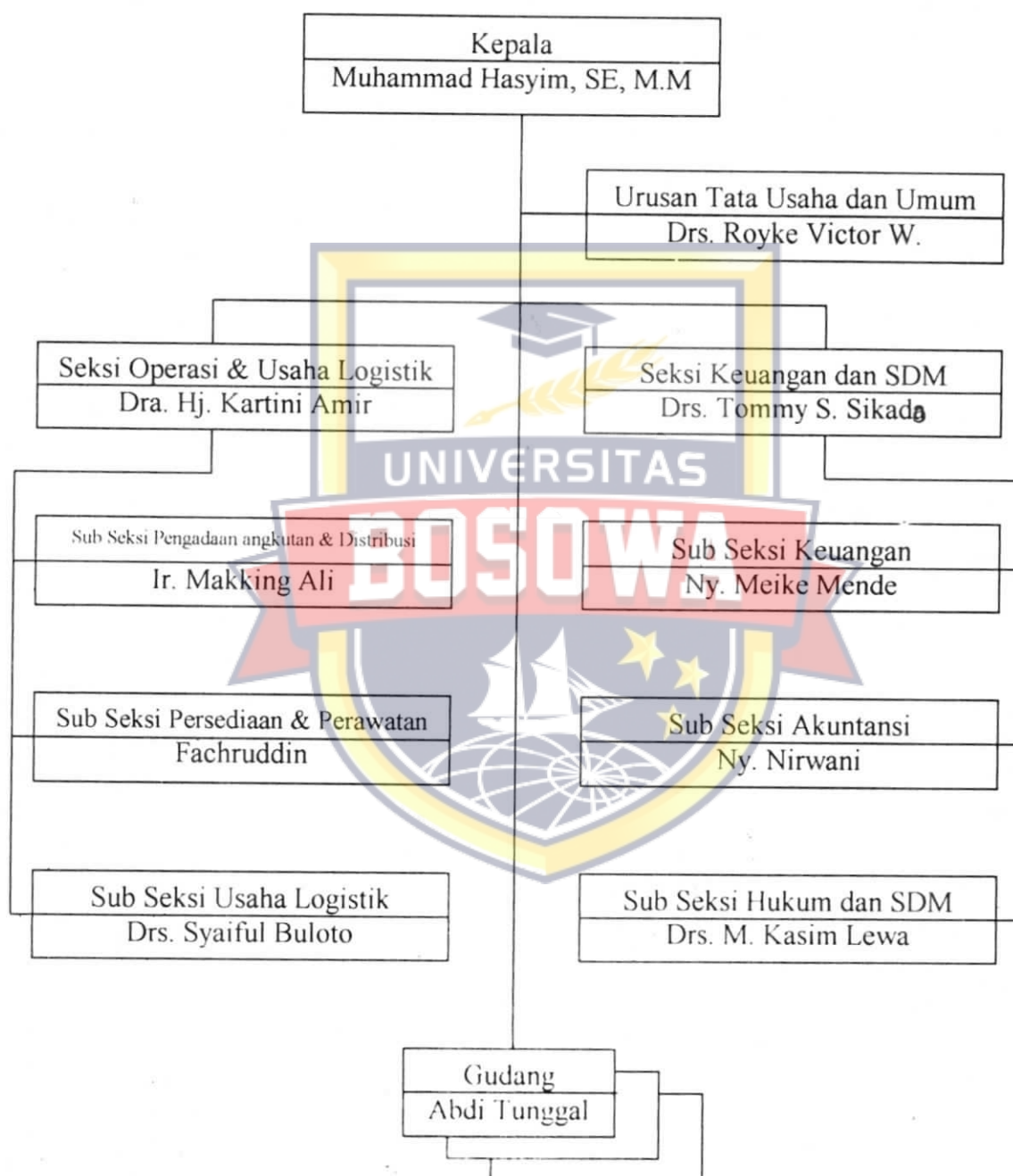
Berdasarkan kesimpulan, maka penulis menyarankan sebagai berikut:

1. Dalam upaya meningkatkan pendapatan petani padi di Desa Tanralili, di mana Sub Dolog Wilayah VII Makassar perlu lebih serius menangani persoalan Harga Dasar Gabah ditingkat petani dan menitikberatkan aktifitasnya pada usaha pengembangan pengelolaan usahatani padi.
2. Dalam rangka pencapaian tujuan secara umum dari Sub Dolog Wilayah VII Makassar, maka hendaknya diadakan peningkatan pelaksanaan semua kebijaksanaan dan keputusan pemerintah yang bersifat koordinatif serta pemantauan dalam penetapan harga dasar gabah kering giling pada wilayahnya agar petani tidak dirugikan.
3. Perlu kerja sama dan perhatian dari pemerintah daerah dalam bentuk pinjaman lunak dan penyuluhan mengenai pengelolaan usahatani padi yang lebih baik serta penanganan pasca panen bagi petani padi agar diperoleh produksi yang maksimal baik kualitas maupun kuantitas.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrachman, 1990. *Manajemen Usahatani*, Penerbit Penebar Swadaya, Jakarta.
- Afandi Andik, 2001. "*Tragedi Petani*". *Musibah Panen Raya Padi 2000*, Yogyakarta, Lembaga Analisis Informasi
- Anonim, 2000. *Beras Impor Ilegal Hancurkan Pertanian Dalam Negeri*. Terbit Jum'at 11 Februari 2000 [www.kompas.com](http://www.kompas.com)
- , 2001. *Peranan Bulog Dalam Pembangunan Ketahanan Pangan*, Temu Wicara Mahasiswa Sosek Se-Indonesia di UMI Makassar 2-3 Oktober 2001.
- , 2001. *Instruksi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2001 Tentang Penetapan Kebijakan Perberasan.Presiden*.
- , 2002. *Pemerintah Siap Amankan Harga Gabah*, Kompas, 01 Februari 2002. [www.kompas.com](http://www.kompas.com).
- , 2002. *Laporan Bulanan*, Sub Dolog Wilayah VII Makassar.
- , 2002, *Pemantauan Harga Gabah di Tingkat Petani*, Pusat Pengembangan Distribusi Pangan, Jakarta.
- , 2002, *Harga Dasar Pembelian Gabah Tidak Naik*, Pengamat Pertanian Korban Perekonomian, Cyber Media Bisnis.
- Daniel, Moehar, 2002. *Pengantar Ekonomi Pertanian*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Kartasaputra, AG, 1997. *Pengantar Ekonomi Produksi Pertanian*, Bina Aksara, Jakarta.
- Mubyarto, 1989. *Ekonomi Pertanian*, Universitas Gadjadara, Yogyakarta
- Wahyu, 1990. *Pengantar Ekonomi Mikro*, Penerbit LP3ES, Jakarta.
- Winardi, 1992. *Azas-Azas Ekonomi Modern*, PT. Alumni Bandung.

Lampiran 1. Struktur Organisasi Sub Depot Logistik Wilayah VII Makassar





Lampiran 3. Analisis Keuntungan Usahatani Padi di Kabupaten Maros, 2003

No. Resp.	Luas Lahan (hektar)	Produksi Gabah (Q) (kg)	Harga Satuan (P) (Rp)	Nilai Produksi (TR=Q x P) (Rp)	Total Biaya (TC) (Rp)	Keuntungan Petani (TR - TC) (Rp)
1	4	18,000	1,000	18,000,000	5,975,000	12,025,000
2	2.8	12,000	1,000	12,000,000	4,148,500	7,851,500
3	1.5	6,000	1,000	6,000,000	2,235,625	3,764,375
4	4.2	19,000	1,000	19,000,000	6,272,750	12,727,250
5	4.8	20,000	1,000	20,000,000	7,176,000	12,824,000
6	3.5	14,000	1,000	14,000,000	5,243,125	8,756,875
7	2	8,000	1,000	8,000,000	2,987,500	5,012,500
8	3	13,000	1,000	13,000,000	4,481,250	8,518,750
9	4.4	19,000	1,000	19,000,000	6,560,500	12,439,500
10	1.7	6,000	1,000	6,000,000	2,538,375	3,461,625
11	2.7	11,000	1,000	11,000,000	4,017,125	6,982,875
12	4	17,000	1,000	17,000,000	5,975,000	11,025,000
13	4.25	20,000	1,000	20,000,000	6,338,438	13,661,563
14	3.7	14,000	1,000	14,000,000	5,505,875	8,494,125
15	3.9	14,000	1,000	14,000,000	5,768,625	8,231,375
16	3.5	13,000	1,000	13,000,000	5,138,125	7,861,875
17	2	7,000	1,000	7,000,000	2,987,500	4,012,500
18	3.7	14,000	1,000	14,000,000	5,505,875	8,494,125
19	2.6	11,000	1,000	11,000,000	3,775,750	7,224,250
20	1.5	4,000	1,000	4,000,000	2,235,625	1,764,375
Total	63.75	260,000	20,000	260,000,000	94,866,563	165,133,438
Rata <sup>2</sup> /pt	3.19	13,000	1,000	13,000,000	4,743,328	8,256,672
Rata <sup>2</sup> /ha	-	4,078	314	4,078,431	1,488,103	2,590,328

Sumber : Hasil Wawancara Responden, 2003

Lampiran 2. Jumlah Biaya Variabel, Biaya Tetap dan Total Biaya Usahatani Padi di Kabupaten Maros, 2003

No. Resp.	Luas Lahan (ha)	Biaya Variabel										Biaya Tetap			Biaya Tetap (FC) (Rp)	Total Biaya (TC=VC+FC) (Rp)
		Benih Padi (Rp)	Pupuk			Pestisida (Rp)	Pengairan (Rp)	Tenaga Kerja (Rp)	Variabel (VC) (Rp)	Pajak Lahan (Rp)	Penyusutan alat (Rp)	Sewa traktor (Rp)				
			Urea (Rp)	TSP (Rp)	KCI (Rp)											
1	4	300,000	896,000	999,000	1,260,000	160,000	120,000	600,000	4,335,000	100,000	140,000	1,400,000	1,640,000	5,975,000		
2	2.8	200,000	627,200	699,300	882,000	100,000	80,000	420,000	3,008,500	70,000	90,000	980,000	1,140,000	4,148,500		
3	1.5	110,000	336,000	374,625	472,500	60,000	45,000	225,000	1,623,125	37,500	50,000	525,000	612,500	2,235,625		
4	4.2	310,000	940,800	1,048,950	1,323,000	170,000	125,000	630,000	4,547,750	105,000	150,000	1,470,000	1,725,000	6,272,750		
5	4.8	350,000	1,075,200	1,198,800	1,512,000	190,000	150,000	720,000	5,196,000	120,000	180,000	1,680,000	1,980,000	7,176,000		
6	3.5	275,000	784,000	874,125	1,102,500	140,000	100,000	525,000	3,800,625	87,500	130,000	1,225,000	1,442,500	5,243,125		
7	2	150,000	448,000	499,500	630,000	80,000	60,000	300,000	2,167,500	50,000	70,000	700,000	820,000	2,987,500		
8	3	225,000	672,000	749,250	945,000	120,000	90,000	450,000	3,251,250	75,000	105,000	1,050,000	1,230,000	4,481,250		
9	4.4	320,000	985,600	1,098,900	1,386,000	180,000	130,000	660,000	4,760,500	110,000	150,000	1,540,000	1,800,000	6,560,500		
10	1.7	130,000	380,800	424,575	535,500	65,000	50,000	255,000	1,840,875	42,500	60,000	595,000	697,500	2,538,375		
11	2.7	200,000	604,800	674,325	850,500	100,000	80,000	405,000	2,914,625	67,500	90,000	945,000	1,102,500	4,017,125		
12	4	300,000	896,000	999,000	1,260,000	160,000	120,000	600,000	4,335,000	100,000	140,000	1,400,000	1,640,000	5,975,000		
13	4.25	315,000	952,000	1,061,438	1,338,750	175,000	125,000	637,500	4,604,688	106,250	140,000	1,487,500	1,733,750	6,338,438		
14	3.7	275,000	828,800	924,075	1,165,500	140,000	100,000	555,000	3,988,375	92,500	130,000	1,295,000	1,517,500	5,505,875		
15	3.9	275,000	873,600	974,025	1,228,500	140,000	100,000	585,000	4,176,125	97,500	130,000	1,365,000	1,592,500	5,768,625		
16	3.5	225,000	784,000	874,125	1,102,500	120,000	90,000	525,000	3,720,625	87,500	105,000	1,225,000	1,417,500	5,138,125		
17	2	150,000	448,000	499,500	630,000	80,000	60,000	300,000	2,167,500	50,000	70,000	700,000	820,000	2,987,500		
18	3.7	275,000	828,800	924,075	1,165,500	140,000	100,000	555,000	3,988,375	92,500	130,000	1,295,000	1,517,500	5,505,875		
19	2.6	150,000	582,400	649,350	819,000	80,000	60,000	390,000	2,730,750	65,000	70,000	910,000	1,045,000	3,775,750		
20	1.5	110,000	336,000	374,625	472,500	60,000	45,000	225,000	1,623,125	37,500	50,000	525,000	612,500	2,235,625		
Total	63.75	4,645,000	14,280,000	15,921,563	20,081,250	2,460,000	1,830,000	9,562,500	68,780,313	1,593,750	2,180,000	22,312,500	26,086,250	94,866,563		
Rata <sup>2</sup> /pt	3.19	232,250	714,000	796,078	1,004,063	123,000	91,500	478,125	3,439,016	79,688	109,000	1,115,625	1,304,313	4,743,328		
Rata <sup>2</sup> /ha	-	72,863	224,000	249,750	315,000	38,588	28,706	150,000	1,078,907	25,000	34,196	350,000	409,196	1,488,103		

Sumber : Data Primer Setelah Diolah, 2001